

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan masyarakat semakin hari semakin meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dengan kebutuhan yang semakin bertambah dan membawa persoalan dalam pemenuhannya. Kebutuhan akan menimbulkan suatu dorongan atau Desakan alami untuk memuaskan kebutuhan tersebut dan adanya kecenderungan untuk mempertahankan hidup. Kebutuhan akan mudah terpenuhi bila sumber-sumber tersedia, tetapi apabila jumlahnya terbatas, maka manusia akan tertantang untuk memenuhi kebutuhan.¹

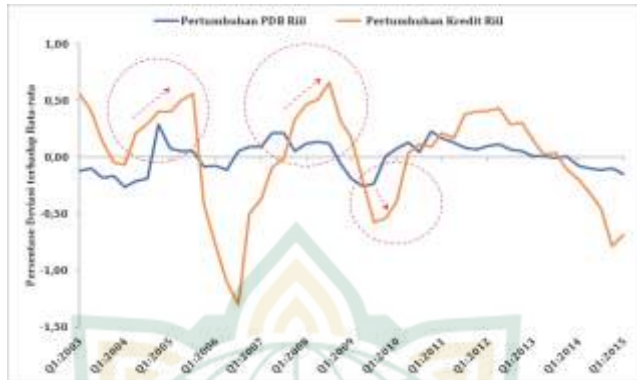
Keadaan ekonomi yang semakin sulit yang terjadi di Indonesia, khususnya dialami oleh wirausahawan, baik usaha yang bersifat kecil, menengah, maupun usaha berskala besar. Wirausahawan yang bergerak di sektor industri, perdagangan, pertanian mengalami kendala dengan keadaan ekonomi yang sulit tersebut. Kendala yang dialami oleh pelaku usaha di bidang ekonomi, yaitu permodalan bagi usaha kecil pada khususnya maupun penambahan modal pada kegiatan usaha yang sudah mapan. Kondisi demikian menyebabkan masyarakat umum dan wirausahaan sangat membutuhkan bantuan keuangan dengan kredit yang terjangkau untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan naiknya daya beli.² Para pedagang kecil merupakan salah satu bagian dari masyarakat golongan ekonomi lemah yang perlu mendapat uluran dari tangan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS Kabupaten Jepara, laju pertumbuhan kredit pinjam modal masyarakat mengalami kenaikan di kuartal pertama tahun 2012, namun pada tahun 2015 mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:

¹ D. Suhartanto, *Perilaku konsumen Indonesia* (Bandung: Guardaya Intimatra, 2008), 32

² D. Suhartanto, *Perilaku konsumen Indonesia* (Bandung: Guardaya Intimatra, 2008), 34

Gambar 1.1
Laju Pertumbuhan ekonomi dipandang dari pertumbuhan kredit³



Permasalahan yang sering dihadapi pedagang kecil dalam meningkatkan usahanya ialah kesulitan dalam permodalan. Untuk meningkatkan usahanya dibutuhkan modal demi mengembangkan usahanya. Seringkali jalan pintas diambil dengan mengambil pinjaman modal yang mempunyai suku bunga tinggi yang diperoleh dari para rentenir. Hal tersebut terpaksa dilakukan karena tidak ada jalan lain yang menjadi pilihan. Pada umumnya pedagang kecil tidak mempunyai pendidikan yang cukup untuk meningkatkan usahanya. Kurangnya pendidikan membuat mereka tidak menyadari pentingnya pengetahuan pasar untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi usaha mereka untuk saat ini maupun masa yang akan datang.⁴

LKM merupakan perwujudan dari pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia, dimana sebagian besar masyarakat tinggal di peDesaan dengan segala potensi ekonominya.⁵ LKM sekarang ini menjadi program yang perlu dikembangkan sesuai dengan fungsi maupun tujuannya. Dengan demikian, keberadaan koperasi di setiap wilayah kecamatan mempunyai arti yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan perkembangan ekonomi di berbagai sektor, maka koperasi diberi ruang gerak usaha yang seluas luasnya untuk lebih memantapkan kemampuan dan peranannya dalam

³ Jeparakab.bps.go.id

⁴ D. Suhartanto, *Perilaku konsumen Indonesia*. 39

⁵ Hendrojogi, *Koperasi, Azaz-azaz, teori dan praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 16

meningkatkan kehidupan masyarakat di pedesaan. Dengan adanya LKM diharapkan dapat membantu usahanya pemerintah daerah untuk meningkatkan taraf hidup warganya yang berkerja sebagai pedagang.⁶

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah koperasi di seluruh Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 150.223 unit. Harapannya, dengan angka tersebut koperasi mampu membantu masyarakat kecil dalam memperoleh pinjaman sehingga dapat meringankan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Demi memenuhi kebutuhan masyarakat, dibentuklah LKM dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya pada kalangan masyarakat menengah kebawah dan mewujudkan keadilan sesuai dengan konsep Islam.⁷

LKM syariah sendiri lahir sejak menjamurnya pendirian beberapa Baitul Maal WatTamwil (BMT) yang pada pertama kali dirintis oleh BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992. BMT berbasis kegiatan ekonomi kerakyatan dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota maka berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum koperasi, dimana letak perbedaannya dengan Koperasi Konvensional (nonsyariah) hanya terletak pada teknis operasionalnya saja, Koperasi Syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya.⁸

Pertumbuhan LKM yang pesat dari segi jumlah, tidak lepas dari peran pemerintah yang tetap berusaha mempertahankan keberadaannya dan mendorong pertumbuhannya. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk memacu perkembangan LKM adalah memberlakukan peraturan baru yaitu UU No. 25 Tahun 1992. Dalam Undang-Undang yang terbaru terdapat beberapa perubahan mendasar dari Undang-Undang sebelumnya yang dilakukan pemerintah sebagai usaha agar LKM tidak semakin ditinggal oleh pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Pemerintah telah melakukan banyak usaha untuk memacu perkembangan koperasi mulai pemberian subsidi, kemudahan prosedur pendirian dengan lahirnya Inpres Nomor 18 Tahun 1998, maupun dengan adanya alokasi kredit murah untuk LKM, dan lain sebagainya.

⁶ Hendrojogi, *Koperasi, Azaz-azaz, teori dan praktek*, 19.

⁷ Noer Sutrisno, Koperasi. Tersedia pada www.ekonomirakyat.org. Diakses pada tanggal 10 Januari 2019.

⁸ Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi

LKM memberi kredit oleh modal usaha dengan bunga relatif rendah. Kebanyakan para pedagang masih memerlukan bantuan modal kerja untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi guna meningkatkan hasil produksi dan pendapatannya, yang berupa sarana produksi maupun uang tunai sesuai dengan alokasi penyediaan dana untuk usaha dagang. Sehingga nantinya akan memberikan peluang dan kesempatan yang lebih luas kepada pedagang untuk mengembangkan dan memperlancar usahanya.⁹

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Kabupaten Jepara, Jenis LKM yang mampu bertahan terutama di daerah peDesaan yaitu Koperasi Kredit atau *credit union*. Realisasi dari cara bekerja lembaga ini yaitu dengan menghimpun simpanan-simpanan di antara anggota- anggotanya kemudian dari hasil simpanan tersebut diatur penggunaannya di antara anggota secara bergantian dalam bentuk pinjaman yang di kemudian hari dalam tempo tertentu harus dilunasi. Jenis Koperasi Kredit ini banyak berkembang di kalangan masyarakat Desa, disebabkan karena kondisi Desa dan masyarakatnya begitu membutuhkan investasi pembangunan, baik dalam bentuk aliran modal atau kredit yang bisa membantu kesulitan-kesulitan ekonomi yang sering dialami.¹⁰ Daerah peDesaan dalam penelitian ini tertuju pada Desa Pancur, dimana Desa tersebut dalam peta wilayah masuk dalam daerah kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Sebagai *wong cilik*, sebagian masyarakat Desa masih banyak yang belum dapat mengakses kredit dari lembaga-lembaga keuangan seperti bank-bank milik pemerintah ataupun bank-bank milik swasta, karena jalur akses langsung bank terhadap masyarakat kecil dalam masalah kredit memang dibatasi oleh persyaratan-persyaratan teknis yang sering tidak mampu dipenuhi oleh masyarakat yang berekonomi lemah. Kehadiran Koperasi Kredit sangat diperlukan terutama untuk masyarakat yang kurang mampu di daerah peDesaan.¹¹

Kelebihan dan kekurangan dalam sistem pelayanan peminjam modal seringkali dianggap menjadi alasan atas pemilihan melakukan pengajuan peminjaman modal di LKM atau di BPR dimana hal tersebut juga terjadi di Desa Pancur Kecamatan Mayong Jepara. Kondisi ekonomi masyarakat di Desa Pancur Kecamatan Mayong Jepara secara garis besar terbagi menjadi tiga golongan, yakni

⁹ Hendrojogi, *Koperasi, Azaz-azaz, teori dan praktek*, 54.

¹⁰ Hendrojogi, *Koperasi, Azaz-azaz, teori dan praktek*, 55

¹¹ Hendrojogi, *Koperasi, Azaz-azaz, teori dan praktek*, 57

ekonomi atas, menengah dan ekonomi rendah. Dalam penelitian ini penentuan kriteria kondisi ekonomi masyarakat dilihat dari besaran pengajuan modal yang telah dilakukan. Hal ini berdasar pada asumsi yang dikeluarkan oleh pihak Bank maupun Koperasi dimana kedua lembaga tersebut telah melakukan survei sebelum memberikan persetujuan pinjaman modal kepada masyarakat. Bisa dikatakan bahwa masyarakat Desa Pancur yang mengajukan pinjaman modal besar dan disetujui oleh LKM maupun bank mengindikasikan kondisi ekonomi masyarakat tersebut berada pada level ekonomi kelas atas karena dianggap telah mampu melakukan perputaran modal yang besar.¹²

Berdasarkan data yang peneliti kumpulkan, data dari pihak LKM menyatakan bahwa pada tahun 2016 jumlah peminjam modal dengan plafon pinjaman dibawah 10 juta sebanyak 19 orang, plafon 25 juta sebanyak 23 orang, dan plafon 50 juta sebanyak 17 orang. Pada tahun 2018 akhir mengalami peningkatan dimana untuk plafon pinjaman 50 juta menjadi 31 peminjam. Kondisi tidak jauh berbeda juga terjadi di BPR sub Cabang Mayong dimana pada tahun 2018 jumlah peminjam plafon 50 juta sebanyak 29 orang, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yakni pada tahun 2016 pihak BPR hanya menyetujui pinjaman dengan plafon 50 juta sebanyak 12 orang.¹³

Peneliti melihat kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa pengajuan pinjaman usaha melalui LKM lebih banyak dilakukan oleh masyarakat daripada melakukan pinjaman di bank. Hal ini tentu menarik peneliti untuk mendalami lebih dalam terkait alasan dan faktor yang membentuk fenomena tersebut. selain itu uraian fenomena tersebut mengindikasikan bahwa koperasi ini mempunyai peranan penting dalam laju pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat dalam Memilih Pinjam Modal di LKM daripada BPR di Desa Pancur Kec Mayong Kab. Jepara”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

¹² Observasi peneliti di Desa Pancur Kecamatan Mayong Kab Jepara

¹³ Observasi peneliti di Koperasi Karya Utama dan BPR sub Cabang Mayong Desa Pancur Kecamatan Mayong Kab Jepara

1. Bagaimana pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Pancur dengan memilih pinjaman modal di LKM daripada BPR?
2. Bagaimana pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Pancur dengan memilih pinjaman modal di LKM daripada BPR menurut perspektif muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Pancur yang memilih pinjaman modal di LKM daripada BPR.
2. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Pancur yang memilih pinjaman modal di LKM daripada BPR di lihat dari prespektif muamalah

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, di antaranya:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi semua pihak tentang pertumbuhan ekonomi, serta, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan di bidang penelitian sejenis atau sebagai bahan pengembangan, apabila akan diadakan penelitian lanjutan.

2. Manfaat paraktis

Manfaat yang bersifat praktis berkaitan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Manfaat yang bersifat praktis dapat bermanfaat bagi penyedia pembiayaan dan (LKM) dan masyarakat. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut

a. Manfaat bagi LKM

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi pengelola LKM untuk menguatkan kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dalam usahanya meningkatkan pendapatan di masa mendatang.

b. Manfaat bagi Masyarakat

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam mencapai pinjaman modal kerja guna meningkatkan pendapatan demi perkembangan ekonomi yang lebih baik.